

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kurun waktu tiga tahun secara berurutan yakni tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai objek kajian. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak, sementara itu variabel independen dalam penelitian ini yaitu komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komisaris independen yang menjadi representasi dari *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana telah dimuat dalam laporan tahunan entitas. Analisis pada penelitian ini mengoperasikan SPSS versi 26.

Populasi dalam riset ini terdiri dari seluruh perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023 sebanyak 158 perusahaan. Pada saat mengambil sampel pada riset ini mengadopsi pendekatan metode *purposive sampling* atau selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

Keterangan		Jumlah
Perusahaan sektor <i>Consumer Cyclical</i> s yang tercatat di BEI		158
Pengambilan Sampel sesuai dengan kriteria / <i>purposive sampling</i> :		
1	Perusahaan yang tidak tercatat di BEI selama tiga tahun	-25
2	Perusahaan yang tidak melaporkan <i>annual report</i> ke publik periode 2021-2023 selama berturut-turut	-27
3	Perusahaan yang tidak mencatat laporan keuangan dengan satuan mata uang Rupiah	-13
4	Perusahaan yang rugi pada tahun 2021, 2022, dan 2023	-55
5	Perusahaan yang tidak mencatat pembayaran pajak secara eksplisit di laporan arus kas	-3
6	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional	-5
Jumlah data sampel perusahaan per tahun		30
Jumlah data sampel perusahaan selama 3 tahun (30 x 3 tahun)		90

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Tarigan & Silaban (2024) merupakan metode pengumpulan dan penyajian data yang mudah untuk dimengerti. Menurut Ghozali (2021) tujuan analisis ini yaitu untuk menyajikan

representasi nilai *mean* (rata-rata), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum setiap variabel. Uraian di bawah menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif yang sudah dilakukan:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Komite Audit	90	3	6	0.517
Kepemilikan Institusional	90	0.01	1.00	0.30406
Kualitas Audit	90	0	1	0.474
Komisaris Independen	90	0.20	0.67	0.10729
Penghindaran Pajak	90	0.01	4..44	0.56158
Valid N (listwise)	90			

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan hasil analisis statistik deskriptif tahun 2021 – 2023 pada tabel 4.2:

1. Komite Audit

Pada analisis statistik deskriptif, variabel komite audit mempunyai jumlah (N) sampel sebanyak 90 perusahaan. Variabel ini terdiri dari nilai minimum 3 dan nilai maksimum 6 dengan standar deviasi sebesar 0.517, ini menunjukkan bahwa entitas sektor *Consumer Cyclical*s memenuhi syarat yaitu memiliki anggota komite audit

minimal tiga orang. Beberapa perusahaan dalam sektor ini bahkan memiliki anggota komite audit lebih dari tiga orang, yang kemungkinan terjadi karena terdapat pergantian atau penambahan anggota selama tahun berjalan, hal tersebut telah tercantum pada laporan tahunan masing-masing perusahaan.

2. Kepemilikan Institusional

Pada analisis statistik deskriptif, variabel kepemilikan institusional memiliki proporsi saham institusional dalam perusahaan yang luas terdiri dari nilai minimum sebesar 0.01, nilai maksimum 1.00 dan standar deviasi sebesar 0.30406. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan terdapat variasi yang signifikan pada tingkat kepemilikan milik institusi, jika nilai kepemilikan institusional tinggi maka semakin besar pengaruhnya dalam pengawasan terhadap manajemen.

3. Kualitas Audit

Pada analisis statistik deskriptif, variabel kualitas audit adalah variabel biner yang terdiri dari nilai minimum 0 dan maksimum 1 dan standar deviasi sebesar 0.474. Nilai 0 diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four*; sedangkan nilai 1 menunjukkan perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*. Variasi tersebut mencerminkan bahwa terdapat perbedaan pada pemilihan KAP dalam entitas sampel.

4. Komisaris Independen

Pada analisis statistik deskriptif menyatakan bahwa proporsi komisaris independen di suatu perusahaan berada dalam rentang antara

0.20 hingga 0.67. Pada pernyataan tersebut berarti bahwa perusahaan sampel mempunyai komposisi komisaris independen paling sedikit 20% dan paling banyak yaitu 67% dari dewan komisaris di perusahaan. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar perusahaan telah mematuhi ketentuan di Indonesia yang mengatur total komisaris independen setidaknya paling sedikit 30% dari total dewan komisaris meskipun masih terdapat perusahaan yang berada di bawah 30% dan tidak memenuhi ketentuan.

5. Penghindaran Pajak

Pada analisis statistik deskriptif menyatakan nilai minimum variabel penghindaran pajak sebesar 0.01 dan nilai maksimum 4.44. Nilai rerata variabel ini tercatat sebesar 0.3829 dengan nilai standar deviasinya 0.56158. Nilai rata-rata tersebut memiliki berarti bahwa perusahaan melakukan pembayaran pajak secara tunai atau kas sekitar 38.29% dari laba sebelum pajak, nilai tersebut lebih dari 0.19 yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui bahwa rata-rata perusahaan sektor ini membayar pajak dalam proporsi yang tinggi dibandingkan laba sebelum pajaknya. Terdapat pula perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara 3 tahun berturut-turut yang dilihat dari nilai CETR kurang dari 0.19 yaitu perusahaan Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (LPIN) dan Eastparc Hotel Tbk (EAST). Pada penelitian ini juga terdapat nilai maksimum mencapai 4.44 atau lebih dari 1, dengan demikian terdapat perusahaan yang membayar pajak

secara kas lebih dari laba sebelum pajak, kondisi itu bisa terjadi akibat kemungkinan adanya beban pajak tangguhan, koreksi fiskal, atau lain sebagainya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Nugroho dkk. (2022) bertujuan untuk menunjukkan apakah data penelitian yang diuji mengikuti pola dengan terdistribusi normal. Temuan dari uji normalitas menggunakan *kolmogorov-smirnov* disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.55779628
Most Extreme Differences	Absolute	0.258
	Positive	0.258
	Negative	-0.253
Test Statistic		0.258
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.000 ^c

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Mengacu pada hasil uji normalitas memakai *Kolmogorov-Smirnov* diketahui nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0.000 artinya

di bawah nilai signifikansi 0.05. Fakta tersebut artinya residual dalam model regresi **tidak berdistribusi normal**, sehingga asumsi klasik dalam regresi linier tidak terpenuhi.

Pada penelitian ini dalam rangka menangani permasalahan uji normalitas tidak terdistribusi normal dapat dilakukan dengan menggunakan metode transformasi data. Menurut Hakimah dkk. (2024) transformasi data merupakan proses dalam melakukan peningkatan normalitas distribusi dari suatu data. Transformasi data dapat dilakukan dengan menggunakan metode akar kuadrat, logaritma, dan teknik lainnya. Setelah data ditransformasi, uraian berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi Data

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.91426278
Most Extreme Differences	Absolute	0.086
	Positive	0.072
	Negative	-0.086
Test Statistic		0.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.095 ^c

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* setelah transformasi data menghasilkan asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.095, mengindikasikan bahwa nilai berikut lebih dari 0.05 dan mengindikasikan data dalam model regresi **terdistribusi normal**.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Nagara & Hendrati (2022) bertujuan untuk melihat kemungkinan adanya keterikatan antar berbagai variabel bebas dalam penelitian ini. Hasil analisis multikolinearitas di penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Komite Audit	0.962	1.039
Kepemilikan Institusional	0.946	1.057
Kualitas Audit	0.916	1.091
Komisaris Independen	0.930	1.075

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

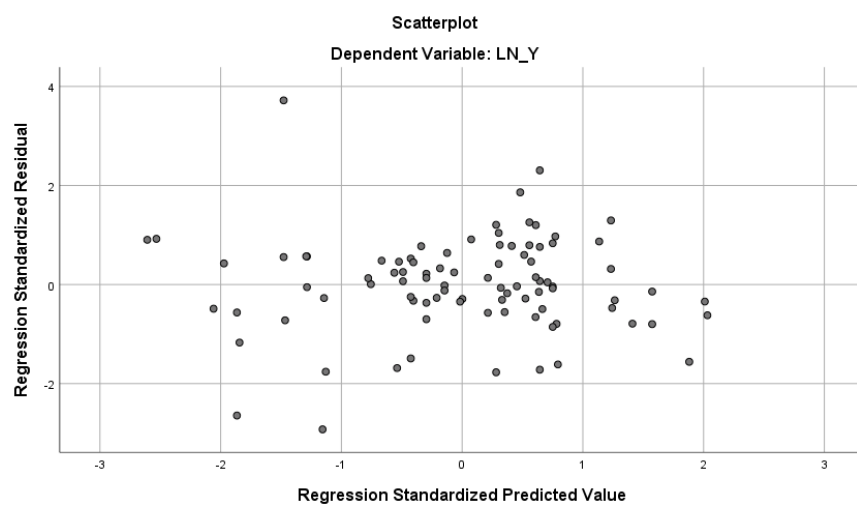
Mengacu pada hasil uji multikolinearitas yang telah dijalankan yaitu nilai tolerance berada di atas 0.10 dan nilai VIF

berada di bawah nilai 10, dengan demikian model ini **tidak terjadi multikolinearitas**.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Nagara & Hendrati (2022) berpendapat bahwa Uji heteroskedastisitas dijalankan supaya mengetahui pengujian model regresi ini apakah residual memiliki perbedaan varian. Varians residual yang tidak konstan dapat mengakibatkan terjadinya heteroskedastisitas. Uraian berikut menyajikan hasil uji heteroskedastisitas pada riset yang telah dilakukan:

Gambar 4.1
Grafik *Scatterplots*



Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan uji heteroskedastisitas didapatkan hasil grafik *scatterplots* yang titik-titiknya menyebar dengan bebas dan bukan membentuk suatu pola, oleh karena itu model regresi **tidak terjadi heteroskedastisitas**.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi sesuai dengan pendapat Nagara & Hendrati (2022) dimaksudkan guna menganalisis apakah terdapat keterkaitan dari nilai variabel dependen saat ini dengan variabel dependen di periode sebelumnya. Pada penelitian ini memakai cara Uji *Durbin – Watson (DW Test)* dengan tujuan melakukan deteksi terhadap autokorelasi. Uraian di bawah adalah hasil dari uji autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0.100	2.175

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis autokorelasi terungkap bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2.175. Pada penelitian ini dengan total sampel (n) = 90 dan total variabel bebas (k) = 4, oleh karena itu didapat nilai $dL = 1.57$ dan $dU = 1.75$.

Interpretasi hasil:

- $4 - dU = 4 - 1.75 = 2.25$
- $dU \leq DW \leq (4 - dU) = 1,75 \leq 2.175 \leq 2,25$.

Berdasarkan interpretasi hasil berikut dapat dikatakan DW berada di rentang dU dan $(4 - dU)$, dengan demikian kesimpulan uji ini yaitu model regresi **tidak terdapat masalah autokorelasi**.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi menurut Afkarina dkk. (2019) dilakukan dengan tujuan melakukan pengukuran atas keterkaitan antara dua maupun lebih variabel. Pada penelitian ini menerapkan metode regresi linear berganda sebab terdapat empat variabel independen. Berikut hasil pengujian analisis regresi linear berganda:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	-2.098	0.790		-2.656	0.009
Komite Audit	-0.216	0.195	-0.113	-1.105	0.272
Kepemilikan Institusional	0.794	0.335	0.245	2.366	0.020
Kualitas Audit	0.174	0.219	0.084	0.795	0.429
Komisaris Independen	1.621	0.958	0.176	1.691	0.095

Variabel Dependen : Penghindaran Pajak

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berikut merupakan persamaan regresi berdasarkan pengujian analisis regresi linear berganda:

$$\text{CETR} = -2.098 - 0.216\text{KA} + 0.794\text{KI} + 0.174\text{KAP} + 1.621\text{KOI} + e$$

Kesimpulan yang dapat diambil dari persamaan regresi tersebut:

1. Nilai intercept konstanta sebesar -2.098 artinya apabila besarnya semua variabel independen adalah 0, dengan demikian besarnya *Cash ETR* (Y) senilai -2.098.
2. Nilai koefisien Komite Audit (KA) sebesar -0.216 artinya apabila variabel Komite audit (X1) meningkat sebesar 1 satuan maka dapat menurunkan *Cash ETR* (Y) sebesar 0.216 dan asumsi variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien Kepemilikan Institusional (KI) sebesar 0,794 artinya apabila variabel Kepemilikan institusional (X2) meningkat sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan *Cash ETR* (Y) sebesar 0,794 dan asumsi variabel independen lain konstan.
4. Nilai koefisien Kualitas Audit (KAP) sebesar 0.174 artinya apabila variabel Kualitas audit (X3) meningkat sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan *Cash ETR* (Y) sebesar 0.174 dan asumsi variabel independen lain konstan.
5. Nilai koefisien Komisaris Independen (KOI) sebesar 1.621 artinya apabila variabel komisaris independen (X4) meningkat sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan *Cash ETR* (Y) sebesar 1.621 dan asumsi variabel independen lain konstan.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dilakukan pengujian koefisien determinasi menurut Sugiarti (2018) adalah untuk melakukan pengujian mengenai seberapa mampu model ini menjabarkan korelasi yang timbul dari variabel independen terhadap variabel dependen yang didapat dari nilai *adjusted R - Squared*. Berikut merupakan hasil dari Uji Koefisien Determinasi (R^2):

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	0.374	0.140	0.100	9.3553

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.100, maka 10% variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen (komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komisaris independen), sedangkan untuk nilai sisanya sebesar 90% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.5.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Menurut Rezeki dkk. (2020) tujuan dilakukan uji hipotesis secara simultan adalah untuk mengetahui apakah dalam penelitian ini variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut merupakan hasil dari uji hipotesis secara simultan (Uji F):

Tabel 4.9
Hasil Uji Hipotesis Signifikansi Anova (Uji F)

	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	12.134	4	3.034	3.466	0.011
Residual	74.393	85	0.875		
Total	86.527	89			

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Merujuk pada hasil pengujian, bisa disimpulkan bahwa model regresi linear berganda layak untuk dilakukan analisis secara mendalam karena nilai Signifikansi (Sig.) senilai 0.011 dengan artian nilai signifikansi < 0.05 .

4.5.3 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Menurut Rezeki dkk. (2020) tujuan dilakukan uji hipotesis secara parsial guna menganalisis apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

secara parsial. Hasil uji hipotesis secara parsial (Uji t) disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (t)

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
Constant	-2.098	0.790	-2.656	0.009
Komite Audit	-0.216	0.195	-1.105	0.272
Kepemilikan Institusional	0.794	0.335	2.366	0.020
Kualitas Audit	0.174	0.219	0.795	0.429
Komisaris Independen	1.621	0.958	1.691	0.095

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Tabel 4.10 menampilkan hasil uji t, berikut merupakan ringkasan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t):

1. Komite Audit (X1)

Nilai t hitung (-1.105) > t tabel (-1.989), maka tidak ada pengaruh. Nilai signifikansi variabel ini tercatat senilai 0.272 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, dengan demikian variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka H1 **ditolak**.

2. Kepemilikan Institusional (X2)

Nilai t hitung (2.366) > t tabel (1.989), maka terdapat pengaruh positif. Variabel ini mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.020 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dan nilai koefisien (0.794) positif sehingga variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap CETR, ketika CETR meningkat maka dapat menurunkan penghindaran pajak, oleh karena itu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka H2 **ditolak**.

3. Kualitas Audit (X3)

Nilai t hitung (0.795) < t tabel (1.989), maka tidak ada pengaruh. Nilai signifikansi variabel ini yaitu senilai 0.429 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, dengan demikian variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka H3 **ditolak**.

4. Komisaris Independen (X4)

Nilai t hitung (1.691) < t tabel (1.989), maka tidak ada pengaruh. Variabel ini memiliki nilai signifikansi 0.095 yang berarti nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, dengan demikian variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka H4 **ditolak**.

4.6 Pembahasan

Berikut merupakan pembahasan yang lebih detail mengenai setiap hipotesis atas hasil uji hipotesis yang telah diuji oleh peneliti :

4.6.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komite audit (X1) yang diukur dengan total anggota komite audit di perusahaan pada hasil analisis uji parsial (t) menunjukkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansi dari komite audit sebesar 0.272 yang lebih besar dari 0.05 dan nilai t hitung -1.105 yang lebih besar dari nilai t tabel -1.989, dengan demikian H1 **ditolak**. Penghindaran pajak tidak dapat dipengaruhi oleh komite audit. Peningkatan jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Komite audit merupakan sebuah komite dibentuk oleh jajaran dewan komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dewan komisaris dalam fungsi pengawasan dan penilaian pada proses penyusunan laporan keuangan supaya laporan keuangan dapat sejalan dengan standar akuntansi contohnya PSAK atau IFRS. Penelitian ini menunjukkan kesamaan hasil riset yang telah dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021), Ramadhanty & Ardiyanto (2022), Ardianti & Nuswandari (2023), Khalista & Nur (2024), serta S. Ariyani & Sunarto (2024) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak. Peningkatan jumlah anggota komite audit di suatu entitas tidak mampu memengaruhi strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Peran komite audit hanya terbatas untuk mengawasi tahapan penyusunan laporan keuangan, sedangkan keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak akan tetap dijalankan tanpa dipengaruhi oleh banyaknya komite audit di perusahaan (Khalista & Nur, 2024).

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori agensi, dalam teori tersebut komite audit menjadi bagian dari tata kelola perusahaan tidak dapat memenuhi harapan prinsipal untuk memantau para manajemen pada saat mengambil kebijakan perpajakan perusahaan terutama dalam pengambilan strategi penghindaran pajak. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak di suatu perusahaan dalam mengawasi tindakan manajemen (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022). Komite audit perlu mendapatkan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak dikarenakan komite audit tidak dapat mengawasi manajemen sendirian. Komite audit memerlukan akses informasi dari berbagai pihak, selain itu juga perlu data maupun temuan-temuan dari auditor internal maupun eksternal, serta legitimasi dari dewan komisaris sehingga rekomendasinya dapat ditindaklanjuti manajemen.

4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kepemilikan institusional (X2) yang diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi di suatu perusahaan pada hasil analisis uji parsial (t) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional sebesar 0.020 (< 0.05) dan nilai koefisien regresi sebesar 0.794 (positif) serta nilai t hitung sebesar 2.366 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1.989, koefisien positif tersebut menandakan bahwa peningkatan variabel kepemilikan institusional akan memengaruhi kenaikan CETR, jika CETR meningkat mengindikasikan penurunan penerapan praktik penghindaran pajak oleh karena itu kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. sehingga H2 **ditolak**. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan akan menurunkan penerapan praktik penghindaran pajak.

Investor institusi memiliki saham di suatu perusahaan disebut dengan kepemilikan institusional. Para institusi ini terdiri dari perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan investasi dan institusi keuangan lainnya. Institusi ini memiliki

kemampuan dalam memantau dan melakukan pengendalian pada manajemen perusahaan guna memastikan keputusan manajemen sejalan dengan tujuan investor institusi yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Para institusi akan mendorong manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021), Aldaniar & Sapari (2023), dan Nursavitri & Parinduri (2024) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin kecil potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak ketika jumlah kepemilikan institusional semakin tinggi (Aldaniar & Sapari, 2023). Umumnya para institusi tersebut mempunyai kepentingan jangka panjang terhadap kinerja perusahaan, institusi ingin reputasi perusahaan tetap baik dengan cara mematuhi peraturan pajak yang berlaku dengan maksud mengurangi potensi terjadinya keputusan yang tidak benar oleh manajemen contohnya seperti penghindaran pajak yang terlalu agresif.

Menurut teori agensi, dalam hubungan *agent* dengan *principal* memiliki potensi timbulnya konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Kepemilikan institusional termasuk elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang dapat meminimalkan konflik tersebut dengan membantu *principal* dalam mengawasi kinerja dan kebijakan manajemen,

maka institusi ini dapat menjadi alat kontrol eksternal bagi *principal* (Simorangkir & Rachmawati, 2020). Sejalan dengan teori agensi tersebut, pada penelitian ini membuktikan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi dapat menekan manajemen untuk menghindari penerapan praktik penghindaran pajak guna mempertahankan nilai dan reputasi perusahaan.

4.6.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kualitas audit (X3) yang diukur dengan kualitas audit eksternal yang dimiliki perusahaan, apakah dari KAP *Big Four* maupun *Non Big Four*, pada hasil analisis uji parsial (t) menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansi dari kualitas audit sebesar 0.429 yang lebih besar dari 0.05 dan nilai t hitung sebesar 0.795 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1.989, dengan demikian H3 **ditolak**. Penghindaran pajak tidak dapat dipengaruhi oleh kualitas audit. Peningkatan kualitas audit yang dimiliki perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam menelusuri kekeliruan pada pencatatan laporan keuangan. Auditor dikatakan memiliki kualitas yang baik ketika pemeriksaan yang telah dilakukan berkualitas dan bersifat independen. Indikator kualitas audit yang baik dapat ditinjau berdasarkan asal auditor, apakah berasal dari KAP *Big Four* atau *non-Big four*, sedangkan

dalam temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan diawasi oleh auditor yang asalnya dari KAP *non-Big Four*. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Yahya dkk. (2021) yang mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit tidak dapat memengaruhi penghindaran pajak karena auditor eksternal tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan atas pajak perusahaan, auditor tersebut hanya menjamin bahwa prinsip akuntansi telah diterapkan pada laporan keuangan perusahaan dengan tepat (Yahya dkk. (2021).

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori agensi, dalam teori tersebut audit eksternal termasuk dalam komponen tata kelola perusahaan yang akan membantu *principal* guna mengawasi kinerja dan kebijakan manajemen dalam menentukan keputusan yang menyangkut aspek perpajakan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa auditor eksternal tidak mampu mendorong *agent* untuk menerapkan praktik penghindaran pajak sebab auditor tidak memiliki wewenang dalam menentukan strategi perusahaan terkait pajak, maka auditor hanya dapat melakukan *monitoring* terhadap laporan keuangan perusahaan (Sidauruk & Fadilah, 2020).

4.6.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komisaris independen (X4) yang diukur dengan proporsi komisaris independen dari total dewan komisaris pada hasil analisis uji parsial (t) menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansi dari komisaris independen sebesar 0.095 (> 0.05) dan nilai t hitung (1.691) lebih kecil dari nilai t tabel (1.989), dengan demikian H4 **ditolak**. Penghindaran pajak tidak dapat dipengaruhi oleh komisaris independen. Peningkatan proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Sebagai bagian dari dewan komisaris, komisaris independen melaksanakan tugasnya secara bebas dan tidak berafiliasi dengan pihak tertentu sehingga dapat melakukan pengawasan secara objektif dan independen. Komisaris independen bertanggung jawab untuk membuktikan perusahaan beroperasi dengan adil, transparan, dapat dipercaya, dan melindungi setiap kepentingan dari para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Yahya dkk. (2021), Ramadhanty & Ardiyanto (2022), Aldaniar & Sapari (2023), Wijaya (2023), dan S. Ariyani & Sunarto (2024) yang menghasilkan temuan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam

penelitian ini menegaskan bahwa banyaknya komisaris independen di suatu perusahaan kurang efisien dalam memengaruhi keputusan manajemen untuk menerapkan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena komisaris independen tidak memiliki wewenang dalam strategi penghindaran pajak karena komisaris tersebut berasal dari luar perusahaan dan hanya melaporkan tata kelola yang baik untuk perusahaan kepada manajemen (Aldanar & Sapari, 2023).

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori agensi, komisaris independen sebagai bagian dari tata kelola perusahaan tidak dapat membantu *principal* dengan mengawasi kinerja manajemen supaya dapat menekan tindakan oportunistik *agent*. Pada penelitian ini membuktikan jumlah komisaris independen justru tidak memberikan pengaruh pada penerapan praktik penghindaran pajak suatu perusahaan dan tidak dapat menyelesaikan konflik *agent* beserta *principal*. Banyaknya anggota komisaris independen di suatu perusahaan tidak memberikan jaminan dapat mengatasi konflik keagenan (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022).